POTENSI KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL TELUK CENDERAWASIH DI PAPUA
(*Potency of Collaborative on Cenderawasih Bay National Park Management in Papua*)*)

Oleh/*By* :
Aji Winara[1] dan/*and* Abdullah Syarief Mukhtar[2]

[1]Balai Penelitian Teknologi Agroforestry, Jl. Raya Ciamis-Banjar Km 4 Po Box 5 Ciamis 46201; Telp. (0265) 771352
awinara1@gmail.com atau mzr_04@yahoo.co.id

[2] Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi, Jl. Gunung Batu No. 5 Po Box 165; Telp. 0251-8633234, 7520067; Fax 0251-8638111 Bogor

*)Diterima: 20 September 2010; Disetujui: 28 Oktober 2011

ABSTRACT

Cenderawasih Bay National Park area has unique ecological characteristics, but unfortunately it has got a serious social problem, e.g. conflict of interest among different stakeholders who were interested on management of natural resources. Collaborative management approaches were needed to minimize conflict of interest. This research aimed to know potency of collaborative management implementation in Cenderawasih Bay National Park. Data were collected by conducting interview with several respondents from different stakeholders. The results showed that several stakeholders, e.g. government institution both central and regional, non government institution, private sector and local community institution, were related with the management of Cendrawasih Bay National Park .. The direct primary stakeholders were the National Park Agency, local government at district level, Non Government Organizations and local communities. Stakeholders have similar goals of conservation, benefit, and support on management. They provide positive contribution on management, yet there was look of synergy, so that collaborative system is potential to be implementation on Cendrawasih Bay National Park management.

Keywords : Stakeholders, Collaborative, Cenderawasih Bay National Park, Papua

ABSTRAK

Kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih memiliki keunikan dan kekhasan karakteristik ekologi, namun mengalami permasalahan sosial. Banyaknya pemangku kepentingan terhadap sumberdaya alam yang terdapat di dalam kawasan mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaannya. Manajemen kolaborasi sangat diperlukan dalam mereduksi konflik kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi implementasi sistem kolaborasi dalam pengelolaan TN Teluk Cenderawasih. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku kepentingan terhadap Taman Nasional (TN) Teluk Cenderawasih adalah (1) kelompok pemerintah, baik pusat maupun daerah, (2) Lembaga Swadaya Masyarakat, (3) pihak swasta dan (4) masyarakat lokal. Pemangku kepentingan utama terhadap pengelolaan taman nasional adalah Balai TN Teluk Cenderawasih, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat adat. Para pemangku kepentingan memiliki kesamaan kepentingan terhadap taman nasional yaitu untuk tujuan konservasi, mengambil manfaat dan aktivitas lain yang mendukung pengelolaan. Terdapat peran positif para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan taman nasional namun belum membentuk sinergi, sehingga sistem kolaborasi potensial untuk diterapkan dalam pengelolaan TN Teluk Cenderawasih.

Kata kunci : Pemangku kepentingan, kolaborasi, Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Papua

I. PENDAHULUAN

Alam menyediakan kelimpahan sumberdaya yang memikat banyak pelaku dengan aneka kepentingan yang kerap berseberangan (Tadjudin, 2000). Penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi merupakan salah satu cara terpenting untuk dapat menjamin agar sumberdaya alam bumi dapat dilestarikan, sehingga sum-

berdaya ini dapat memenuhi kebutuhan umat manusia sekarang dan di masa yang akan datang.

Konsep pelestarian yang modern adalah pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya bumi secara bijaksana, bukan hanya sekedar melindungi yang menutup peluang pemanfaatan (MacKinnon *et al*., 1990). Konsep kawasan konservasi di Indonesia saat ini mengacu pada UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang membagi kawasan konservasi menjadi dua yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Taman Nasional termasuk ke dalam KPA yang diharapkan dapat memberikan jalan tengah dalam pengelolaan kawasan konservasi antara tujuan perlindungan dan pemanfaatan. Sementara itu TN Teluk Cenderawasih merupakan salah satu taman nasional di Papua yang memiliki keunikan dan kekhasan ekologis serta permasalahan sosial berupa konflik kepentingan.

Tekanan dan ancaman pengelolaan taman nasional di Pulau Papua sebagian besar disebabkan faktor sosial antara lain berupa penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, penangkapan ikan secara ilegal, tuntutan hak ulayat atas kawasan, pembalakan liar, perambahan hutan, pemanfaatan hasil hutan nir kayu tidak ramah lingkungan, perburuan satwa liar tidak terkendali, pemukiman liar, dan perdagangan tanah dalam kawasan (Setio dan Mukhtar, 2005).

Muara dari persoalan kerusakan hutan adalah rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup yang disebabkan oleh pergeseran basis ekonomi kebutuhan (*needs economic*) menuju ekonomi pendapatan (*incomes economic*) hingga ekonomi keserakahan (*greeds economic*), sementara itu sebagian besar masyarakat sekitar hutan masih ada pada kondisi jurang kemiskinan (Marzuki, 2008). Bergotong-royong mengelola kawasan konservasi di Indonesia memang diperlukan, karena menyangkut kompleksnya sub sistem ekologis, budaya, ekonomi dan politik dengan keterkaitan berbagai isu dan keterlibatan banyak kelompok kepentingan dalam masing-masing subsistemnya, sehingga hubungan kolaboratif menjadi penting ketika tidak adanya kesepakatan yang dapat dibangun secara sederhana dan universal untuk mendapatkan solusi terbaik dari konflik yang terjadi (Natural Resources Management, 2001).

Transformasi peran kelembagaan pengelolaan taman nasional di Papua dari *government based management* menjadi *collaborative management* telah berjalan terutama setelah dikeluarkannya perundangan tentang sistem pengelolaan kolaborasi yaitu Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) no. P.19/ Menhut-II/ 2004 tentang kolaborasi dalam pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Penerapan sebuah sistem pengelolaan yang baru dan melibatkan banyak pihak dengan berbagai kepentingan menjadi tantangan tersendiri, sehingga kajian penerapan sistem kolaborasi berbasis potensi pemangku kepentingan dalam pengelolaan taman nasional di Papua sangat penting sebagai pembelajaran dan perbaikan pengelolaan kawasan taman nasional ke depan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penerapan manajemen kolaborasi dalam pengelolaan TN Teluk Cenderawasih di Papua.

II. BAHAN DAN METODE

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2005. Lokasi penelitian adalah kawasan TN Teluk Cenderawasih meliputi wilayah administrasi Distrik Rumberpon, Roon dan Wasior yang terletak di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat serta Distrik Nabire yang terletak di Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

B. Metode Penelitian

Obyek kajian adalah lembaga yang terkait dengan pengelolaan TN Teluk Cenderawasih. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah wawancara dengan responden kunci meliputi para pengambil kebijakan utama di masing-masing instansi atau lembaga antara lain : (1) Balai TN Teluk Cenderawasih sebanyak tiga orang, (2) Pemerintah Daerah terkait diwakili oleh Dinas terkait lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebanyak empat orang (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dan Dinas terkait di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire sebanyak satu orang (Dinas Perikanan), dan (3) Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di Pulau Rumberpon dan Pulau Roon. Sementara itu data sekunder diperoleh dari Balai TN Teluk Cenderawasih dan Pemerintah Daerah terkait.

Data yang dikumpulkan meliputi aspek kelembagaan dari setiap responden kunci, interaksi lembaga dengan taman nasional (peran dan kepentingan) serta persepsi responden terhadap taman nasional.

C. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan bantuan tabel dan diagram. Analisis data dilakukan melalui dua pendekatan yaitu analisis realitas manajemen kolaborasi dan analisis potensi pengembangan manajemen kolaborasi.

Analisis realitas pelaksanaan manajemen kolaborasi dilakukan melalui tahapan antara lain :

1. Identifikasi pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan taman nasional meliputi lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.
2. Analisis kepentingan dan peran ak-tual para pemangku kepentingan ter-hadap pengelolaan taman nasional serta pola hubungannya terhadap fungsi pengelolaan taman nasional.

Analisis potensi pengembangan manajemen kolaborasi dilakukan melalui bantuan analisis kekuatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) menurut Meyers (2001) dan Permenhut nomor P.19/ Menhut-II/2004. Analisis kekuatan *stakeholder* dilakukan melalui tahapan :

1. Pembobotan pada setiap lembaga pemangku kepentingan menggunakan skala tinggi sampai rendah terkait dengan nilai penting pemangku kepentingan bagi pengelolaan taman nasional dan nilai penting taman nasional bagi pemangku kepentingan.
2. Pengelompokan setiap lembaga yang berada pada skala bobot nilai penting dilakukan dengan bantuan matrik kuadran. Pengelolaan para pemangku kepentingan dalam membangun manajemen kolaborasi untuk masing-masing kuadran mendapat pendekat-an yang berbeda. Para pemangku kepentingan yang berada dalam kuad-ran paling penting atau termasuk *stakeholder* primer adalah lembaga yang memiliki nilai penting tinggi.

Disamping analisis kekuatan pemangku kepentingan, pengembangan manajemen kolaborasi di TN Teluk Cenderawasih dilakukan melalui pembelajaran terhadap proses yang telah dilakukan dan potensi peran kolaborasi para pemangku kepentingan berdasarkan Permenhut No. P.19/Menhut-II/2004.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Pengelolaan kolaborasi adalah suatu metode untuk mengakomodasi berbagai kepentingan di sekitar kawasan konservasi. Pengelolaan kolaborasi juga dikenal sebagai salah satu pendekatan yang bukan bersifat permusuhan (*non adversarial approach*) untuk penyelesaian permasalahan dan penyelesaian konflik, sehingga dalam prakteknya kolaborasi banyak di-

gunakan untuk menyelesaikan sengketa antara para pemangku kepentingan dalam konflik multipihak. Oleh karena itu pendekatan kolaborasi sering disebut juga sebagai jembatan untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam (Supohardjo, 2005). *Stakeholder* atau pemangku kepentingan adalah sumberdaya manusia (SDM) yang berarti bagi suatu sistem (Meyer, 2001).

Hasil identifikasi pemangku kepentingan terhadap pengelolaan TN Teluk Cenderawasih menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan terdiri dari lembaga pemerintah pusat dan daerah serta lembaga nir pemerintah sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan pada TN Teluk Cenderawasih terdiri atas delapan kategori, antara lain pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, LSM, lembaga swasta, TNI dan Kepolisian, masyarakat adat dan lembaga keagamaan. Pemangku kepentingan terhadap kawasan TN Teluk Cenderawasih termasuk lengkap dan mewakili semua sektor yang berpotensi untuk membangun sistem kolaborasi.

Tabel 2 menunjukkan adanya persamaan kepentingan antara para pemangku kepentingan dengan tujuan umum pengelolaan taman nasional. Persamaan kepentingan tersebut antara lain bertujuan untuk : 1) Pelestarian kawasan; 2) Pemanfaatan kawasan; dan 3) Pendukung pengelolaan, sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.

Gambar 1 menunjukkan terdapat pemangku kepentingan yang ada pada dua kepentingan yang sama yaitu Balai Taman Nasional, Pemerintah Daerah, LSM dan masyarakat adat. Kesamaan kepentingan terletak pada aspek perlindungan kawasan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara ekonomi.

Tabel (*Table*) 1. Para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan TN Teluk Cenderawasih (*Stakeholders of Cenderawasih Bay National Park mangement*)

No	Kelompok pemangku kepentingan (*Stakeholders group*)	Lembaga (*Institution*) TN Teluk Cenderawasih (*Cenderawasih Bay National Park*)
1	Pemerintah Pusat	a. Balai TN Teluk Cenderawasih
		b. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Papua dan Papua Barat
		c. Balai Penelitian Kehutanan Manokwari
		d. Balai Latihan Kehutanan Manokwari
2	Pemerintah Daerah	a. BAPPEDA Kabupaten Teluk Wondama dan Nabire
		b. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Teluk Wondama dan Nabire
		c. Dinas Tingkat II terkait
		d. Distrik dan kelurahan/kampung
3	Lembaga Pendidikan	a. Universitas Cendrawasih
		b. Universitas Negeri Papua
4	LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)	a. WWF Marine Indonesia
		b. Yayasan YALHIMO
5	Lembaga bisnis swasta dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)	a. Perusahaan kontraktor
		b. Pedagang pengumpul di setiap kampung dalam kawasan
		c. Perusahaan perikanan
		d. Perusahaan jasa perjalanan wisata/*travel*
6	TNI/POLRI	a. KODIM/KORAMIL Manokwari-Nabire
		b. POLRES Manokwari-Nabire
		c. TNI AL Manokwari
7	Masyarakat adat/ LMA	a. LMA Teluk Wondama, LMA Nabire
		b. Semua kampung di dalam kawasan
8	Lembaga keagamaan	a. Dewan Gereja
		b. Majelis Ulama Indonesia Kab. Teluk Wondama dan Nabire

Tabel (*Table*) 2. Kepentingan dan peran para pemangku kepentingan dalam pengelolaan TN Teluk Cenderawasih (*Interest and role of stakeholders on Cenderawasih Bay National Park*)

No	Pemangku kepentingan (*Stakeholder*)	Kepentingan (*Interest*)	Peran (*Role*)
1.	Balai Taman Nasional	a. Tanggung jawab pengelolaan kawasan b. Kelestarian fungsi kawasan c. Kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan	a. Program dan kegiatan pengelolaan b. Penempatan SDM untuk melakukan pengelolaan kawasan c. Pengalokasian anggaran pengelolaan
2.	Pemerintah Daerah Kabupaten	a. Kelestarian sistem penyangga kehidupan b. Kesejahteraan masyarakat c. Pembangunan infrastruktur pemerintahan d. Pembangunan wilayah e. Pencitraan internasional	a. Pemberdayaan masyarakat b. Memberikan bantuan sarana produksi kehutanan, pertanian dan perikanan c. Program rehabilitasi hutan dan lahan d. Pembangunan sarana dan prasarana umum serta perumahan sosial e. Memberikan dukungan kebijakan
3.	LSM	a. Kelestarian kawasan b. Pemberdayaan masyarakat c. Penguatan kelembagaan	a. Menghantarkan proses terbentuknya taman nasional b. Memfasilitasi komunikasi antar pihak yang berkepentingan c. Pemberdayaan masyarakat
4.	Masyarakat adat dalam kawasan	a. Sumber mata pencaharian b. Ikatan budaya	a. Mendukung penetapan kawasan b. Menjaga kawasan secara partisipatif c. Pembinaan budaya masyarakat
5.	Pihak swasta	a. Pasokan komoditas hasil laut b. Keberlanjutan usaha	Menjadi sentra perekonomian masyarakat
6.	TNI dan POLRI	a. Eksistensi lembaga b. Stabilitas wilayah	a. Pengamanan gabungan b. Pembinaan masyarakat
7.	Lembaga ilmi-ah, pemetaan dan diklat	a. Ilmu pengetahuan dan teknologi b. Peningkatan kualitas SDM.	a. Menyediakan data dasar potensi kawasan b. Survey dan pemetaan tata batas c. Pendidikan dan pelatihan keahlian
8.	Lembaga agama	Eksistensi umat	Pembinaan keagamaan

Kepentingan yang kerap terjadi benturan adalah kepentingan perlindungan ekosistem dan pemanfaatan ekonomi seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan atau racun sianida yang dapat merusak eksosistem terumbu karang. Meskipun aktivitas tersebut dilakukan oleh beberapa oknum pribadi bukan lembaga namun dapat berdampak pada kerugian pihak lain.

Gambar 2 menunjukkan terdapat lembaga yang memiliki tiga peran sama yaitu Balai Taman Nasional dan LSM. Peran tersebut adalah berupa perlindungan ekosistem, pemberdayaan ekonomi dan pembinaan sosial kemasyarakatan. Hal ini dapat terjadi disebabkan pihak Balai Taman Nasional dan LSM merupakan lembaga yang proaktif dalam melakukan pengelolaan dan sejak awal mengawal proses pembentukan taman nasional. Sementara itu lembaga lainnya hanya melaksanakan program sesuai tugas dan fungsi lembaganya masing-masing dengan obyek program ada dalam kawasan taman nasional sehingga akan bersinggungan dengan pengelolaan kawasan.

Sebagain besar peran para pemangku kepentingan bersifat positif, meskipun peran yang dilakukan oleh para pihak sebagian besar tidak terkoordinasi atau berjalan masing-masing, baik dari aspek perencanaan maupun latar belakang program.

B. Potensi Pemangku Kepentingan

Pengelolaan taman nasional secara kolaboratif sangat bergantung pada kekuatan para pemangku kepentingan yang terdapat di dalamnya. Analisis kekuatan pemangku kepentingan dilakukan pada tahap awal membangun proses kolaborasi.

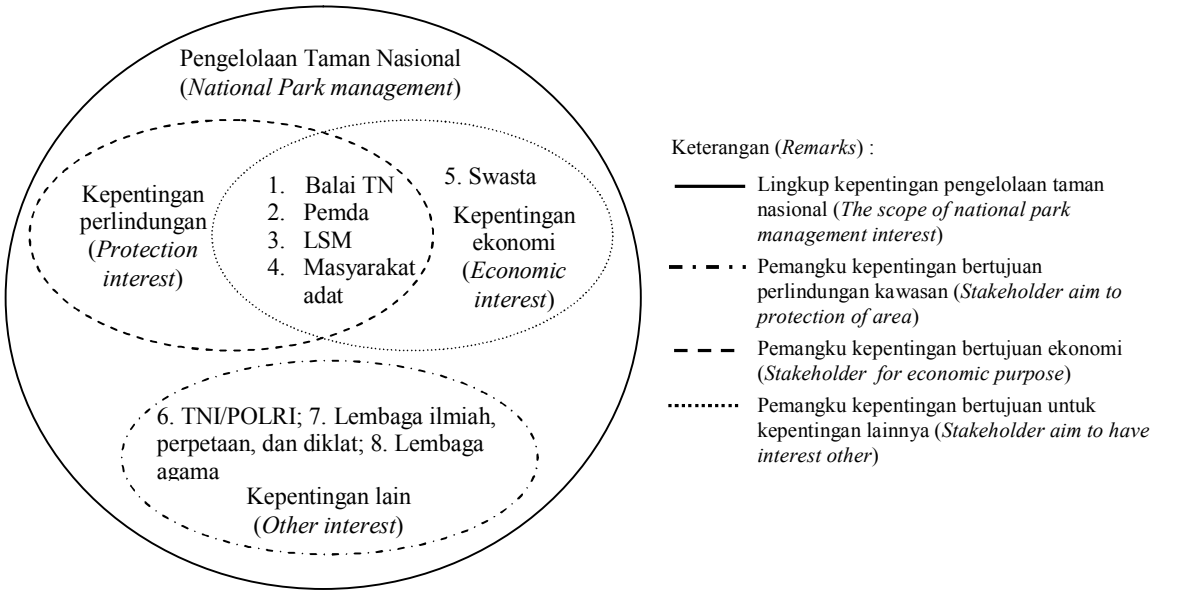

Gambar (*Figure*) 1. Kepentingan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan TN Teluk Cenderawasih (*Stakeholders interest on Cenderawasih Bay National Park management*)

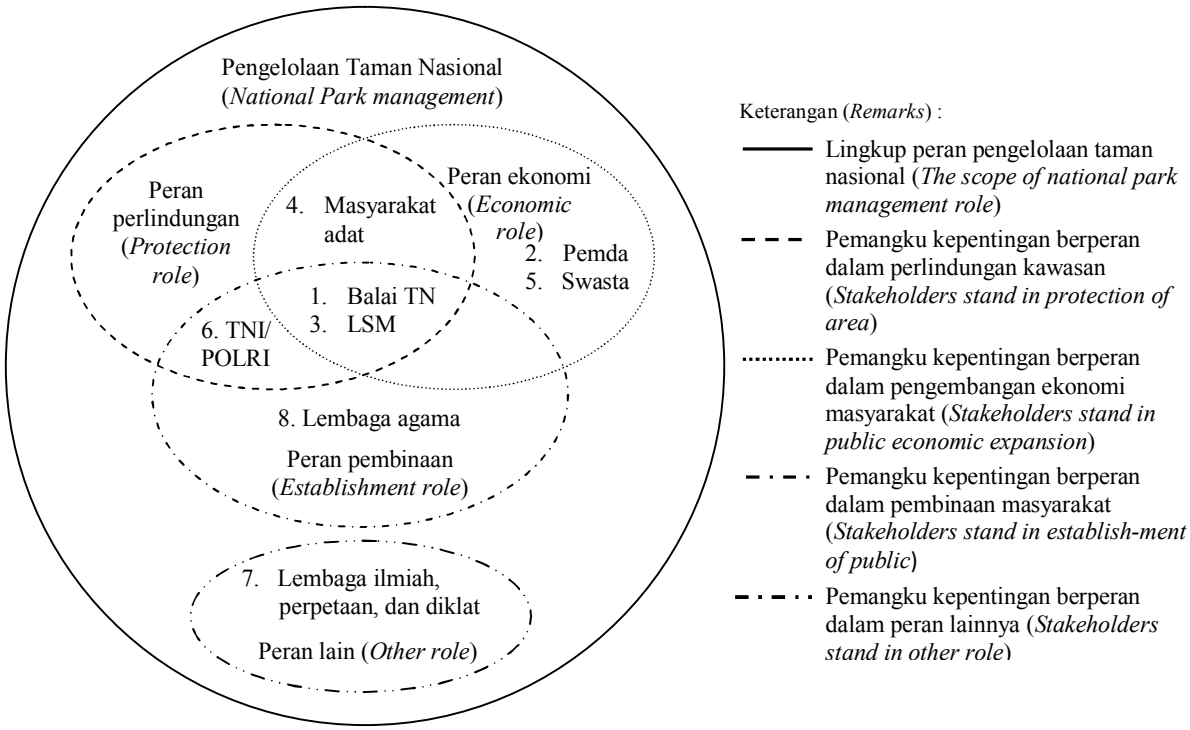

Gambar (*Figure*) 2. Peran pemangku kepentingan terhadap pengelolaan TN Teluk Cenderawasih (*Role of stakeholder on Cenderawasih Bay National Park management*)

Menurut Meyer (2001), analisis kekuatan *stakeholder* adalah suatu piranti untuk membantu memahami bagaimana masyarakat mempengaruhi kabijakan dan lembaga, dan sebaliknya, bagaimana kebijakan dan lembaga mempengaruhi mereka.

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan derajat nilai penting dan pengaruh pada setiap pemangku kepentingan meskipun terdapat pula yang memiliki derajat yang sama yaitu Balai Taman Nasional, Pemerintah Daerah, LSM

dan Masyarakat Adat. Hal ini senada dengan pendapat Meyers (2001) bahwa para pemangku kepentingan memiliki derajat kekuatan yang sangat berbeda-beda untuk mengontrol keputusan yang berpengaruh pada kebijakan dan lembaga, dan mereka memiliki derajat potensi yang berbeda untuk disumbangkan atau derajat kepentingan yang berbeda untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian pendekatan yang harus dilakukan pada setiap pemangku kepentingan akan berbeda.

Tabel (*Table*) 3. Nilai penting dan pengaruh antara pemangku kepentingan dan pengelolaan TN Teluk Cenderawasih (*Important value and influence between stakeholders and Cenderawasih Bay National Park management*)

No	Pemangku kepentingan (*Stakeholders*)	Nilai penting taman nasional bagi pemangku kepentingan (*Important value of national park for stakeholder*) (A)	Nilai penting pengaruh pemangku kepentingan bagi pengelolaan taman nasional (*Important value of stakeholders influence for national park management*) (B)
1.	Balai Taman Nasional	Tinggi. Menentukan keberhasilan kinerja organisasi	Tinggi. Memiliki kewenangan pengelolaan
2.	Pemerintah Daerah	Tinggi. Pencapaian tujuan pembangunan dan pencitraan daerah di tingkat internasional	Tinggi. Memiliki daya dukung program, SDM dan dana.
3.	Masyarakat Adat	Tinggi. Kelestarian fungsi budaya dan daya dukung ekonomi	Tinggi. Legitimasi dan pengawasan serta pengelolaan kawasan
4.	Lembaga Swadaya Masyarakat	Tinggi. Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Tinggi. Motivator dan pengawal kebijakan
5.	Lembaga Bisnis	Tinggi. Keberlanjutan pasokan produksi	Sedang. Kontrol pemanfaatan dan peningkatan derajat ekonomi masyarakat
6.	TNI/POLRI	Rendah. Mengurangi faktor tekanan dan ancaman	Tinggi. Membantu monitoring supremasi hukum
7.	Lembaga Penelitian dan pemetaan	Rendah. Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Tinggi. Memberikan daya dukung *database* potensi kawasan dan sosialiasi kawasan
8.	Lembaga keagamaan	Rendah. Peningkatan kapasitas kelembagaan	Tinggi. Pembinaan kualitas spiritual yang melawan pengrusakan sumberdaya alam

Kepentingan tinggi (*High interest*)	A. Pengawasan (*Monitoring*) 5. Pihak Swasta	B. Optimalisasi membangun kolaborasi (*Oprimalization of collaborative building*) 1. Balai Taman Nasional 2. Pemerintah Daerah 3. Masyarakat Adat 4. LSM
Kepentingan rendah (*Low*	C. Pengurangan Dampak (*Impact minimize)*	D. Membangun kapasitas untuk pelibatan (*Capacity building for participation)* 6. TNI dan POLRI 7. Lembaga Penelitian dan Pemetaan 8. Lembaga Keagamaan
	Pengaruh rendah (*Low influence*)	Pengaruh tinggi (*High influence*)

Gambar (*Figure*) 3. Model pendekatan terhadap pemangku kepentingan untuk membangun partisipasi kolaborasi dalam pengelolaan taman nasional di Papua berdasarkan tingkat nilai kepentingan dan pengaruh (*Model of stakeholder approach for participation on collaborative national park management in Papua based on values of role and interest level*)

Pendekatan pengelolaan berupa optimalisasi kolaborasi dapat dilaksanakan pada Balai Taman Nasional, Pemerintah Daerah, Masyarakat Adat dan LSM. Empat pemangku kepentingan tersebut adalah tergolong pemangku kepentingan utama langsung (*direct primery stakeholders*). Pemangku kepentingan utama memiliki kepentingan dan pengaruh langsung yang tinggi terhadap pengelolaan taman nasional. Optimalisasi kolaborasi yang harus intensif dilakukan pada tahap awal meskipun forum kolaborasi telah terbentuk adalah komunikasi aktif untuk menyamakan pandangan tentang urgensi pengelolaan dan kontribusi nyata setiap pemangku kepentingan.

Pendekatan pengelolaan pemangku kepentingan berupa pelibatan dan membangun kapasitas (kotak D pada Gambar 3) dapat dilakukan terhadap para pemangku kepentingan anatar lain TNI/ POLRI, Lembaga Ilmiah, Pemetaan dan Diklat, serta Lembaga Keagamaan. Para pemangku kepentingan tersebut tergolong para pihak utama tidak langsung (*indirect primery stakeholders*). Penggolongan ini dilatarbelakangi oleh nilai pengaruh peran pemangku kepentingan yang tinggi terhadap pengelolaan taman nasional, namun kepentingan lembaganya terhadap kawasan termasuk sedang. Alasan ini yang menyebabkan pendekatan membangun kapasitas kelembagaan menjadi penting bagi para pihak tersebut, sehingga potensi yang dimiliki lembaga tersebut dapat optimal diaktualisasikan untuk mencapai tujuan pengelolaan taman nasional.

Sementara itu tidak terdapat pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan tinggi namun pengaruhnya rendah atau pemangku kepentingan yang hanya berpotensi sebagai ancaman semata bagi pengelolaan kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa setinggi apapun kepentingan terhadap potensi kawasan bahkan yang dapat berdampak negatif masih memiliki sisi potensi positif yang dapat digunakan untuk berkontribusi pada pengelolaan kawasan taman nasional.

E. Membangun Kolaborasi

Berdasarkan Permenhut Nomor P.19/ Menhut-II/2004, kolaborasi dalam pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dapat dilakukan melalui delapan program antara lain : (1) penataan kawasan; (2) penyusunan rencana pengelolaan kawasan; (3) pembinaan daya dukung kawasan; (4) pemanfaatan kawasan, penelitian dan pengembangan; (5) perlindungan dan pengamanan potensi kawasan; (6) pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan; (7) pembangunan sarana dan prasarana, dan (8) partisipasi masyarakat.

Mengacu pada Permenhut No. P.19/ Menhut-II/2004, maka para pemangku kepentingan di TN Teluk Cenderawasih memiliki potensi yang dapat sejalan dalam manajemen kolaborasi taman nasional sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan bahwa semua program pengelolaan taman nasional berpotensi untuk didistribusikan pada pihak lain dalam sebuah sinergi manajemen kolaborasi, sehingga manajemen kolaborasi sangat potensial untuk diterapkan meskipun keberhasilan penerapan manajemen kolaborasi harus didukung oleh aspek kelembagaan yang kuat. Sebagaimana menurut Tadjudin (2000), bahwa kelembagaan kolaborasi yang dibangun akan sukses apabila ditopang oleh beberapa pilar antara lain dukungan sosial budaya, pemaduan kelembagaan, dukungan administratif, dukungan keuangan, dan reduksi konflik.

Luasnya cakupan wilayah administrasi TN Teluk Cenderawasih yang terbagi pada dua kabupaten dan dua provinsi memerlukan dukungan energi yang besar dalam membangun kolaborasi. Proses komunikasi dalam mengakomodasi berbagai kepentingan dan membangun konsensus bersama membutuhkan proses yang

Tabel (*Table*) 4. Potensi peran pemangku kepentingan sesuai Permenhut No.P.19/Menhut-II/2004 (*Potential function of stakeholders based on Permenhut No.P.19/Menhut-II/2004*)

No.	Program yang dapat dikolaborasikan (*Activity of management can be collaborate*)	Pemangku kepentingan potensial di luar Balai TN (*Stakeholders potential behind National Park Agency*)
1.	Penataan kawasan	Balai Pemantapan Kawasan Hutan
2.	Penyusunan rencana pengelolaan kawasan	Semua Pihak
3.	Pembinaan daya dukung kawasan	a. Pemerintah Daerah b. LSM
4.	Pemanfaatan kawasan, penelitian dan pengembangan	a. Pemerintah Daerah b. Pihak Swasta c. Masyarakat Adat d. lembaga Penelitian e. Perguruan Tinggi
5.	Perlindungan dan pengamanan potensi kawasan	a. TNI/POLRI b. Masyarakat Adat
6.	Pengembangan sumberdaya manusia	a. Balai Diklat b. LSM c. Lembaga keagamaan
7.	Pembangunan sarana dan prasaran	a. Pemerintah Daerah b. Balai TN Teluk Cenderawasih
8.	Partisipasi masyarakat	a. LSM b. Masyarakat Adat

tidak cepat. Sebagaimana menurut Ramirez (2001) bahwa membangun kolaborasi harus mengakomodasi berbagai kepentingan yang terkait dengan hak, tanggung jawab, aturan dan pendapatan. Meskipun demikian, menurut Suporahardjo (2005), walaupun kolaborasi memiliki kesulitan dalam pelaksanaannya, meningkatnya kesuksesan dan manfaat kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan telah membuat pendekatan ini semakin populer.

Membangun kolaborasi pada tahap awal adalah membangun kesepahaman antar pemangku kepentingan. Sebagaimana menurut Marzuki (2008) bahwa kepedulian lingkungan harus disadarkan pada setiap individu masyarakat, namun tantangan terbesar adalah bagaimana memobilisasi kesadaran individu menjadi aksi kolektif dan kolaborasi parapihak dapat menjadi gerbang awal sinergi ekonomi dan konservasi dalam pengelolaan taman nasional. Sementara itu menurut Wonolleck dan Yaffee (2000) *dalam* Suporahardjo (2005), kesuksesan kerja kolaborasi dapat diraih apabila terbangunnya pandangan yang sama (*coomon ground*), kesempatan baru untuk berusaha, menginteraksikan pemangku kepentingan dalam setiap proses, fokus dalam mengatasi masalah dengan cara baru dan berbeda, peningkatan kepekaan dan tanggungjawab, terbangunnya hubungan antar individu bukan hanya organisasi, terbentuknya jiwa mengabdi dan proaktif, serta adanya pengakuan terhadap bantuan pihak lain.

Membangun kolaborasi dalam pengelolaan TN Teluk Cenderawasih dapat dilakukan melalui beberapa langkah antara lain : (1) Membangun kesamaan pandangan berkolaborasi dari para pemangku kepentingan, (2) Membangun kelembagaan kolaborasi yang kuat termasuk nota kesepahaman dan kesepakatan kerja kolaborasi dari semua pihak yang terlibat, (3) Membangun iklim kolaborasi yang kondusif, (4) Menghadirkan pihak yang mampu menjadi inisiator dalam mengawal proses kolaborasi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Potensi pemangku kepentingan dalam pengelolaan TN Teluk Cendera-

wasih sangat besar sehingga memungkinkan untuk dilaksanakannya praktek kolaborasi sesuai Permenhut No. P.19/Menhut-II/2004.

2. Pemangku kepentingan utama langsung dalam pengelolaan taman nasional di Papua antara lain Balai Taman Nasional, Pemerintah Daerah, Masyarakat Adat dan LSM. Sedangkan pemangku kepentingan utama tidak langsung antara lain TNI/ POLRI, Lembaga Ilmiah, Pemetaan dan Diklat, serta Lembaga Keagamaan.

B. Saran

1. Membangun kesepahaman dari semua pemangku kepentingan harus tuntas dilakukan pada tahap awal membangun kolaborasi pengelolaan TN Teluk Cenderawasih.
2. Membentuk forum kolaborasi pengelolaan TN Teluk Cenderawasih yang dapat memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Anshari, G.Z. 2007. Dapatkah pengelolaan kolaboratif menyelamatkan Taman Nasional Danau Sentarum. CIFOR. Bogor. www. Cifor.cgiar. org. *diakses tanggal 02 Nopember 2007.*

Mackinnon, J., K. Mackinnon, G. Child dan J. Thorsell. 1990. Pengelolaan kawasan yang dilindungi di daerah tropika. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Marzuki, R. 2008. Kisah sukses kolaborasi konservasi, membangun optimisme kelestarian hutan. www. Kabarindonesia.com. *diakses tanggal 22 April 2009.*

Meyers, J. 2001. Analisis kekuatan *stakeholder*. Hal 161-204. Suporahrdjo (edt.). 2005. Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralime Membangun Konsensus. Pustaka Latin. Bogor.

Natural Resources Management Programme. 2002. Membangun kembali upaya mengelola kawasan konservasi di Indonesia melalui manajemen kolaboratif : prinsip, kerangka kerja dan panduan implementasi. PHKA-Dephut NRM/EPIQ WWF Wallacea TNC. Jakarta.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/ Menhut-II/2004 tentang Pengelolaan kolaboratif di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. De-partemen Kehutanan. Jakarta.

Ramirez, R. 2001. Memahami pendekatan-pendekatan kolaborasi : usaha mengakomodasi kepentingan *multi-stakeholder*. Hal 37-72. Suporahardjo (edt.). 2005. Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralime Membangun Konsensus. Pustaka Latin. Bogor.

Setio, P. dan A.S. Mukhtar. 2005. Pengelolaan taman nasional di Indonesia: Review Hasil-Hasil Penelitian Litbang. Departemen Kehutanan. Bogor.

Supohardjo. 2005. Strategi dan praktek kolaborasi : sebuah tinjauan. Hal 3-34. Suporahardjo (edt.). 2005. Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsensus. Pustaka Latin. Bogor.

Tadjudin, D. 2000. Manajemen kolaborasi. Pustaka Latin. Bogor.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Departemen Kehutanan. Jakarta.